BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional sebagai salah satu usaha untuk mencapai kemajuan dibidang ekonomi dan mensejahterahkan kehidupan rakyat diperlukan sumber dana yang sangat tinggi untuk membiayai kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana menunjang di berbagai kegiatan dan pekerjaan di segala bidang kehidupan.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju (Syamsi, 1998 : 90).

Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus adil dan merata di seluruh tanah air. Hal ini tidak terlepas adanya peranan pembangunan daerah yang merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Untuk mempercepat pembangunan di daerah maka pemerintah pusat telah memberikan hak otonomi pada pemerintah daerah untuk menggali dana dan mengelolah dana tersebut untuk membiayai pembangunan di daerah masing-masing.

Asas-asas otonomi dan desentralisasi ditujukan untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan dan tersebar di seluruh pelosok negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pernyataan tersebut di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2007. Kebijakan ini merupakan upaya koordinasi

pemerintah pusat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa. (Widhihastuti,dkk, 2001 : 52).

Surabaya sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia, juga diberikan hak otonomi yaitu mengatur dan mengurus rumah tangga intern daerah yang bersangkutan. Hal ini berarti Surabaya merupakan daerah otonomi, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (Syamsi, 1998 : 198).

Pemberian hak otonomi ini juga berkaitan hak untuk menggali dan mengelolah dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Masalah-masalah keuangan yang di hadapi oleh daerah berkisar pada usaha peningkatan pendapatan dan juga berkenaan dengan pengeluaran dana untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat di daerah. (Syamsi, 1998 : 86).

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya mengalami perkembangan yang cukup besar, Pada tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar Rp 207.993.326.710,-. Pada tahun 2012 Pendapata Asli Daerah Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 277.863.171.000,-. Sedangkan pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya terjadi peningkatan sebesar Rp.348.310.014.000,-. Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya meningkat sebesar Rp 417.361.035.009,-. Tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 496.190.083.100,-. (Anonim, 2016 : 403).

Faktor yang diperkirakan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah faktor jumlah penduduk. Dengan peranan penduduk sebagai sumber tenaga kerja dan faktor produksi skill maka dengan jumlah penduduk yang besar pada suatu daerah akan menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan.

Hal ini disebabkan dengan jumlah penduduk yang besar, produksi suatu daerah juga besar.

Berdasarkan data tersebut diatas maka peneliti tertarik malakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Surabaya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan dan inflasi dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya ?
2. Manakah diantara variabel bebas di atas yang berpengaruh paling dominan terhadap variabel terikat (Pendapan Asli Daerah) di Kota Surabaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan, dan inflasi terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui variabel bebas yang berpengaruh paling dominan terhadap variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah) di Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi serta memberikan wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya.
2. Sebagai bahan studi bagi yang ingin mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kota Surabaya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 .Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah faktor- faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pernah di sampaikan beberapa orang penelitian antara lain adalah

1. Menurut Rosalina (1999: xi) dengan judul : Beberapa Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk (X1), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X2), dan jumlah tenaga pemungut pajak (X3) secara simultan atau menyeluruh berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bayuwangi (Y) bahwa jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena t_{hitung} sebesar 5,170 dan 10,700 terletak pada daerah Ho ditolak sedangkan jumlah tenaga pemungut pajak secara parsial tidak berpengaruh secara nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah karena t_{hitung} sebesar = 0,333 > t_{tabel} sebesar -2,4469.
2. Menurut Astuti (2001 : xi) dengan judul : Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dari hasil penilitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan uji F untuk regresi secara simultan, PDRB (X1), penerimaan dari pajak (X2), dan tingkat inflasi (X3) berpengaruh secara nyata terhadap PAD dengan nilai F_{hitung} = 33,032 > F_{tabel}= 3,76 menggunakan level of significant sebesar α = 0,05, dapat diketahui bahwa variable bebas PDRB (X!) berpengaruh secara nyata terhadap variabel terikat dengan t_{hitung} = -2,722 < t_{tabel} = -1,943, untuk variabel bebas penerimaan pajak (X2) di peroleh t_{hitung} = 8,585 > t_{tabel} = 1,943 yang berarti bahwa penerimaan pajak (X2) berpengaruh terhadap PAD (Y), untuk variabel bebas tingkat inflasi (X3)

diperoleh $t_{hitung} = -2,325 < t_{tabel} = 1,943$ yang berarti bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap PAD (Y).

3. Solichin (2002 : xi) dengan judul : Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kotamadya Kediri. Dari hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk (X1), inflasi (X2), dan jumlah industri (X3) secara simultan mempengruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) dengan $F_{hitung} = 10,144$ dan $F_{tabel} = 4,76$ dengan $\alpha = 0,05$ sedangkan dari pengujian secara parsial dengan mengunakan uji t, variabel bebas berpengaruh secara nyata terhadap variabel terikat yaitu PAD (Y) dengan menggunakan rumus $^{\alpha}/_{2} = 0,005$ sehingga hasil yang diperoleh yaitu $t_{hitung} = 4,107 > t_{tabel} = 1,943$, sedangkan variabel inflasi (X2) tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel terikat dengan $t_{hitung} = -1,647 > t_{tabel} = -1,1943$, sedangkan variabel jumlah industri (X3) tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel terikat dengan $t_{hitung} = 1,273 < t_{tabel} = 1,943$. Hal ini dikarenakan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka Ho diterima dan Hi ditolak. Dari ketiga variabel di atas dapat di ketahui bahwa variabel jumlah penduduk memberikan pengaruh terbesar yaitu 74% terhadap PAD (Y).
4. Menurut Goryatim (2002 ; xi) dengan judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Probolinggo. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Variabel PDRB (X1) tidak berpengaruh secara nyata terhadap PAD (Y), yang disebabkan karena pemerintah kurang memanfaatkan sektor-sektor perekonomian yang ada sehingga PDRB menjadi turun dan mengakibatkan produktivitas, yang secara tidak langsung akan diikuti dengan turunnya produksi. Untuk variabel bebas jumlah penduduk (X2) diperoleh $t_{hitung} = 2,609 > t_{tabel} = 2,201$ yang berarti jumlah penduduk berpengaruh nyata terhadap PAD. Dan variabel inflasi (X3) tidak berpengaruh secara nyata terhadap PAD (Y) yang di sebabkan karena terus naiknya harga-harga barang sehingga mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Sehingga perubahan PDRB

maupun inflasi dapat di katakan tidak berpengaruh terhadap naik turunnya Pendapatan Asli Daerah.

5. Fariqun (1999 : 83) dengan judul, " Potensi Dan Kendala Penningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus di Kabupaten / Daerah Tingkat II Blitar), penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya hikum dilihat dari segi normanya dan pelaksanaannya masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa potensi sumber - sumber PAD Kabupaten Dati II Blitar sebenarnya masih cukup besar. Potensi sumber - sumber PAD yang besar tersebut tidak dapat di gali oleh Kabupaten Dati II Blitar karena sebagian besar diambil oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas ada perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu bahwa penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel bebas sedangkan penelitian sekarang menggunakan empat variabel bebas karena pengunaan empat variabel bebas dapat lebih menunjang penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan faktor-faktor di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membuktikan bahwa faktor-faktor yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan dan inflasi berpengaruh atau tidak pada Pendapatan Asli Daerah dan seberapa besar pengaruh yang diberikan dari masing-masing faktor.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari : pajak daerah, restribusi daerah, laba usaha daerah dan penerimaan lain-lain.(Anonim ,1999 : 10). Adapun definisi pendapatan asli daerah yang lain adalah

1. Pendapatan merupakan jumlah seluruh uang yang di terima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Pendapatan terdiri dari

upah penerima tenaga kerja. Pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden suatu pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran. (Nordhaus, 1993 : 58).

2. Pendapatan sebagai suatu ukuran kesanggupan pajak dapat didefinisikan dengan luas sebagai keuntungan ekonomis yang di terima seseorang selama suatu waktu dengan lebih tepat (Due, 1993 : 508).
3. Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan (Anonim, 1991 : 150).

Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat disimpulkan sebagai berikut : pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya. Pendapatan Asli Daerah sangat diperlukan untuk lebih memperlancar dan meningkatkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah-daerah, maka dari itu tiap-tiap daerah selalu mengharapkan adanya peningkatan pendapatan daerah yang berarti juga dapat lebih meningkatkan pembangunannya.

Sumber Pendapatan Asli daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menyebutkan bahwa pendapatan daerah berasal dari (Anonim, 1999 : 10).

1. Pajak Daerah

   Pungutan daerah berdasarkan peraturan yang diterapkan dan daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik tanpa memberikan prestasi kembali yang berlangsung dapat ditunjuk.
2. Restribusi Daerah

   Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan karena jasa yang diberikan oleh daerah.

3. Hasil Perusahaan Daerah

   Penerimaan yang berasal dari perusahaan yang dimiliki pemerintah daerah dengan prinsip pengolahan berdasarkan ekonomi perusahaan dan sebagian keuntungan wajib setor ke kas daerah.

4. Lain-lain Usaha Daerah

   Penerimaan yang merupakan hasil dari uasaha daerah selain tersebut di atas seperti penerimaan dari dinas-dinas daerah dan penerimaan dari persewaan tanah, rumah, gedung, kendaraan milik pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah sangat diperlukan untuk lebih memperlancar dan meningkatkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah-daerah, maka dari itu tiap-tiap daerah selalu mengharapkan adanya peningkatan pendapatan daerah yang berarti juga dapat lebih meningkatkan pembangunannya.

2.2.1.1. Sumber Penerimaan Daerah

Pembangunan Daerah yang dilaksanakan memerlukan dana yang tidak sedikit, sumber-sumber pembiayaan tersebut dimasukkan sebagai penerimaan daerah yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Penerimaan yang berasal dari pemerintah yang tinggi.
3. Pinjaman daerah.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan dana yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunannya. Yang termasuk ke dalam PAD adalah pajak daerah, restribusi daerah, laba perusahaan daerah dan penerimaan lain-lain.

a. Pajak Daerah.

Yang dimaksud denga pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir / swasta ke sektor pemeritah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa yang timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau pemerintah”.

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dibedakan dalam 2 kategori yaitu : pajak daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah yang tergolong ke dalam pajak daerah diantaranya adalah :

1. Pajak potong hewan.
2. Pajak jalan.
3. Pajak pembangunan I.
4. Pajak radio.
5. Pajak pendaftaran perusahaan.
6. Pajak kendaraan tidak bermotor.
7. Pajak kendaraan bermotor.
8. Pajak reklame dan sebagainya.

Menurut (Kristiadi, 1998 : 12) pajak daerah secara teori hendaknya memenuhi beberapa persyaratan, antara lain :

1. Tidak bertentangan atau searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.
2. Sederhana dan tidak banyak jenisnya.
3. Biaya administrasinya rendah.
4. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat.
5. kurang dipengaruhi oleh “*business cycle”* tapi dapat berkembang dengan meningkatnya kemakmuran.
6. Beban pajak relatif seimbang dan “*tax base”* yang sama diterapkan secara nasional.

Adanya batasan serta asas-asas pajak daerah seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2000, tentang peraturan umum pajak daerah yaitu :

1. Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak.
2. Pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya atau pengangkutan barang kedalam dan keluar daerah.
3. Dalam peraturan pajak daerah tidak diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan dan keagamaan.
4. Duta atau konsul asing, demikian pula orang-orang yang termasuk kedutaan atau konsulat asing tidak boleh diberi pembebasan dari pajak daerah selain dengan keputusan presiden.

Pajak daerah yang dilaksanakan dinilai dengan menggunakan ukuran sebagai berikut:

1. Hasil (*yielt*), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungutan.
2. Keadilan (*equity*), yaitu pajak dan kewajiban harus membayar dan jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil baik secara horisontal maupun vertikal. Secara horisontal artinya adalah orang atau obyek pajak yang mempunyai kedudukan ekonomi sama maka akan dikenakan beban pajak yang sama. Secara vertikal adalah bagi mereka yang mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat atau memiliki sumber daya ekonomi lebih besar hendaknya memberikan sumbangan yang lebih besar. Dan pajak tersebut haruslah adil dari tempat ke tempat dalam arti hendaknya tidak ada

perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*), artinya pajak hendaknya mendorong atau tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.
4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), suatu pajak harus dapat dilaksanakan sudut kemampuan politik dan tata usaha.
5. Kecocokan dengan sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue*), artinya harusnya jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya juga mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

b. Penerimaan lain-lain

Adalah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tidak dapat dimasukkan kedalam tiga jenis penerimaan diatas, yang masuk dalam penerimaan ini antara lain :

a. Hasil penjualan barang investasi daerah.
b. Penerimaan karena biaya penagihan dengan surat paksa.
c. Hasil dari pengerjaan atau perbaikan terhadap kendaraan yang berbentuk perusahaan daerah.
d. Hasil ganti rugi penyerahan bibit ikan, bibit ternak, bibit tanaman dan lain sebagainya.
e. Penjualan drum bekas aspal.

f. Penerimaan sewa mesin perata jalan.
g. Penerimaan karena mengaspal jalan masuk rumah orang lain (pihak ketiga).
h. Penerimaan bunga dari Bank Pembangunan Daerah.
i. Penerimaan tahun lalu yang baru dapat diterima tahun berikutnya.

Melihat sifatnya yang sangat relatife, maka penarimaan lain-lain ini harus dikelola secara teliti dan harus sering mendapatkan pengawasan dari aparat Pemda yang bertugas dalam pengawasan keuangan, Dan perlu diingat bahwa penerimaan lain-lain ini dari tahun ke tahun cenderung berubah, ada kalanya turun dan naik dengan jumlah yang cukup drastis.

B. Penerimaan dari Pemerintah yang Lebih Tinggi

Pambangunan yang dilaksanakan di daerah memerlukan dana yang tidak sedikit sehingga ada kalanya Pendapatan Asli Daerah tidak mencakup, maka untuk ini pemerintah yang lebih tinggi secara vertikal memberikan dana kepada daerah di bawahnya, yang dimasukkan sebagai penerimaan daerah dari pemerintahan yang lebih tinggi (Gede dan Wahendra, 1998 : 26).

C. Pinjaman Daerah

Untuk mendukung dan menunjang pembangunan di daerah bila dana tidak mencukupi atau belum terkumpul pada waktu tertentu, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Kepala Daerah dapat membuat pinjaman namun hanya untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Pinjaman daerah tersebut dapat dilakukan dengan pihak swasta, antar Pemda, pemerintah pusat atau Negara, maupun dengan pihak luar negeri, yang dimasukkan ke dalam pos penerimaan pembangunan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk membiyai pembangunan daerah tersebut atau dengan kata lain pinjaman tersebut untuk investasi di

daerah yang akan menimbulkan *backward linkage*, ataupun *forward lingkage* dalam pembangunan daerah (Gede dan Wahendra, 1998 : 27).

2.2.1.2. Bangunan

Yang dimaksud dengan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan :

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik dan emplasementnya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dalam kompleks bangunan tersebut.
b. Jalan tol.
c. Kolam renang.
d. Pagar mewah.
e. Tempat olah raga.
f. Galangan kapal, dermaga.
g. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Pajak pembangunan I adalah pajak yang dikenakan atas semua pembayaran guna pembelian makanan dan minuman pada rumah makan (selanjutnya disebut restoran) dan atau sewa kamar pada suatu kamar penginapan (selanjutnya disebut hotel). Pajak pembangunan I merupakan pajak tidak langsung yang dikelolah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II, khususnya dalam menunjang biaya pembangunan.

Tujuan pemungutan pajak pembangunan I adalah mengumpulkan dana untuk kepentingan pembangunan, maka pajak ini disebut pajak pembangunan I. Subyek pajak pembangunan I adalah orang-orang atau badan yang mengurusi rumah makan dan rumah penginapan yang kemudian subyek pajak ini berkembang menjadi apa yang dinamakan sebagai wajib bayar apabila subyek pajak tersebut memenuhi persyaratan.

Dasar hukum pajak pembangunan I dasar hukum pemungutan pajak pembangunan I adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2.
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemungutan pajak pembangunan I pada rumah makan (restoran) dan rumah penginapan (hotel).
3. Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang pembangunan keuangan pusat dan daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2000 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2.2.1.3. Pajak Bumi Dan Bangunan.

Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak argraris, dimana bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Mereka yang memperoleh manfaat langsung dari sumber-sumber kekayaan tersebut dengan demikian wajar untuk membayar sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak”. (Kartasapoetra, dkk, 1998 : 18).

Pungutan pajak atas tanah pada masa lalu disebut dengan iuran Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut IPEDA), dimana yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 11 Prp (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) tahun 1959 L N (Lembaran Negara) Nomor 104 tahun 1959, dan dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1961. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disahkan menjadi Undang-undang. Pada dasarnya UU No.11 Prp Tahun 1959 tersebut mengambil alih materi pokok dasar-dasar pengenaan dari Ordonasi Pajak Bumi tahun 1939 dan hanya mengadakan perubahan-perubahan seperlunya sesuai dengan situasi dan kondisi serta kepentingan rakyat sebagai

pemenuhan rasa keadilan dan pemerataan, agar pungutan tersebut tidak dirasakan sebagai beban yang berat. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pungutan atau tarif yang diterapkan yaitu sebesar 5% dari hasil obyek pajak IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) yang bersangkutan, sedangkan pada Pajak Bumi menurut Ordonansi Pajak Bumi Tahun 1939 tarif yang dikenakan adalah sebesar 8% sampai dengan 20%.

Sistem yang berlaku pada masa itu khususnya pajak kebendaan dan pajak kekayaan telah menimbulkan tumpang tindih antara pajak yang satu dengan pajak yang lainnya, sehingga menghasilkan beban pajak berganda bagi masyarakat. Sistem perpajakan yang baru oleh sebab itu diadakan agar dapat memberikan kepercayaan pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan. Adanya Undang-undang atau Ordonansi yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan harus disebut, yaitu :

a. Ordonansi pajak rumah tangga tahun 1908.
b. Ordonansi verponding Indonesia tahun 1923.
c. Ordonansi Verponding tahun 1928.
d. Ordonansi pajak jalan tahun 1932.
e. Ordonansi pajak kekayaan tahun 1942.
f. Undang0undang darurat No. 11 tahun 1957, khususnya pasal 14 huruf j, k, l.
g. Undang-undang No. 11 Prp thun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi

(Kartasapoetra, dkk, 1998 : 20).

Obyek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan yang berada di wilayah Indonesia. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Termasuk dalam pengertian bangunan menurut (Soemitro , 2000 : 56) adalah :

a. Jalan Lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
b. Kolam renang.
c. Pagar mewah.
d. Tempat olah raga.
e. Galangan kapal.
f. Taman mewah.
g. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.
i. Jalan tol.

Pengertian bumi dan bangunan sebagaimana tersebut di atas menurut (Kartasapoetra, dkk,1998 : 21) mempunyai pengecualian artinya ada obyek pajak yang tidak terkena Pajak Bumi dan Bangunan, seperti halnya yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, yaitu :

a. Rumah sakit umum.
b. Tempat pendidikan, madrasah, pesantren.
c. Panti asuhan.
d. Tempat ibadah (Masjid, Gereja, Wihara).
e. Sarana olah raga.
f. Musium, candi, pekuburan.
g. Kompleks peninggalan kerajaan.
h. Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman panggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani oleh hak.
i. Tanah bangunan yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik seperti, Konsulat Amerika, Konsulat Perancis.

Subyek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 adalah “orang atau

badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan / atau memperoleh manfaat atau bangunan" (Undang-Undang Dasar No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan) adalah pajak pemerintah pusat (10%) Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I (16,2%) Maupun Daerah Tingkat II (64,8%).

2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain menurut (Anwar, dkk, 1992 : 162), Produk Domestik Regional Bruto diartikan sebagai jumlah seluruh nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor / lapangan usaha yang melakukan kegiatan usaha di suatu daerah atau regional tidak tampa pemilihan / faktor produksi.

Sedangkan menurut (Dumairy, 1997 : 38), yang mengemukakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto sebagai salah satu indikator pembangunan regional juga berfungsi sebagai tolak ukur dalam melihat tingkat kemakmuran suatu daerah. Jadi Produk Domestik Regional Bruto secara agresif menunjukkan kemampuan suatu daerah tertentu dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut serta dalam proses produksi di daerah setempat.

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun). Produk Domestik Regional Bruto dapat diukur melalui tiga macam pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran (Anonim, 2002 : 3).

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto merupakan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu 1 tahun, sehingga dapat diartikan bahwa Produk Domestik

Regional Bruto mencerminkan gambaran mengenai produk asli yang dihasilkan suatu daerah.

2.2.2.1. Pendekatan Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Cara perhitungan Produk Domestik Regional Bruto dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan berikut ini:

A. Menurut pendekatan produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu :

1. Sektor pertanian.
2. Sektor pertambangan dan penggalian.
3. Sektor industri pengolahan.
4. Sektor listrik, gas dan air bersih.
5. Sektor bangunan dan kontruksi.
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran.
7. Sektor pengangkutan dan komunikasi.
8. Sektor bank dan lembaga keuangan lainnya.
9. Sektor sewa rumah.

B. Menurut pendekatan pendapatan

Produk Domesti Regional Bruto adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan yang semuanya belum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

C. Menurut pendekatan pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir dari :

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
2. Konsumsi pemerintah.
3. Pembentukan modal tetap domestik bruto.
4. Perubahan stock.
5. Ekspor netto dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

   Ekspor netto adalah ekspor dikurangi impor (Kamaluddin, 1990 : 20).

Oleh karena itu ketiga perhitungan tersebut, secara konsep seharusnya jumlah pengeluaran harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi.

2.2.3. Jumlah Penduduk

Cabang ilmu pengetahuan yang paling banyak menarik perhatian para ahli ekonomi adalah ilmu tentang kependudukan. Yang dimaksud kata penduduk disini adalah penduduk manusia dan bukan yang lainnya (seperti misalnya ternak, tumbuhan dan sebagainya). Arti dari penduduk itu sendiri adalah orang yang bertempat tinggal disuatu daerah atau wilayah tertentu. Ketertarikan para ahli ekonomi terhadap masalah kependudukan karena penduduk itulah yang melakukan produksi maupun konsumsi. Hal ini dikarenakan penduduk itulah yang menjadi subyek ekonomi.

Sebagai subyek ekonomi, maka penduduklah yang akan dapat menentukan perkembangan perekonomian suatu negara atau daerah menjadi lebih baik atau buruk. Jumlah serta mutu penduduk suatu negara atau daerah merupakan unsur penentu yang paling penting bagi kemampuan memproduksi serta standar hidup suatu negara atau

daerah. Namun demikian, sebab yang paling utama mengapa masalah penduduk ini sangat menarik perhatian adalah penduduk itu merupakan sumber tenaga kerja, di samping sumber faktor produksi skill. (Rosydi, 1994 : 84).

Dengan peranan penduduk sebagai sumber tenaga kerja dan faktor produksi skill maka dengan jumlah penduduk yang besar pada suatu daerah akan menunjang peningkatan pendapatan daerah yang bersangkutan. Hal ini disebabkan dengan jumlah penduduk yang besar, produksi suatu daerah juga besar. Selain itu, seperti yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 disebutkan bahwa penduduk yang besar jumlahmya sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan.

Menurut (Rosydi, 1994 : 89), apabila suatu negara memiliki jumlah penduduk yang terlalu sedikit, maka mungkin sekali itu tidak akan mampu untuk memanfaatkan sumber-sumbernya dengan seefisien mungkin. Sebagaimana yang mungkin akan dihasilkannya jika saja jumlah penduduknya lebih besar. Dalam keadaan seperti ini usaha untuk mewujudkan produksi besar-besaran sangat terhalangi.

Peranan penduduk sebagai sumber tenaga kerja dan faktor produksi skill, maka dengan jumlah penduduk yang besar dan kualitas yang baik pada suatu daerah yang bersangkutan. Hal ini disebabkan dengan jumlah penduduk yang besar, produksi suatu daerah juga besar. Selain itu seperti yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 disebutkan bahwa penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan

Penduduk merupakan faktor yang penting sebagai wajib pajak, karena pajak adalah gejalah sosial artinya pajak hanya terdapat didalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat, berarti tidak akan ada pajak sebab pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara pajak dan masyarakat erat sekali. Pajak-pajak didalam masyarakat

dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk meratakan pendapatan dengan menerapkan tarif yang progresif. (Rachmat dan Soemitro, 1998 : 41)

Uraian di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk sangat menentukan di dalam menentukan besarnya produksi suatu daerah yang berarti berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah. Dengan demikian jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertentu.

2.2.4. Pengeluaran Pembangunan

2.2.4.1. Pengertian Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang dicapai. (Anonim, 1999 : 5)

Belanja pembangunan yang sesui dengan pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang intinya adalah dirinci dalam sektor-sektor, kemudian diperinci dalam program, masing-masing program dirinci ke dalam suatu proyek-proyek dan masing-masing proyek diperinci dalam suatu bagan anggaran.(Anonim, 2000 : 89).

2.2.4.2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Suatu anggaran yang telah ditetapkan berarti telah membuat suatu keputusan kegiatan pengunaan dana yang dilaksanakan dan dari mana memperoleh sumber penerimaannya. Dimana anggaran merupakan suatu perencanaan yang terbagi menjadi penerimaan dan pengeluaran.

Anggaran *(budget)* adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam waktu tertentu (Suparmoko, 2002 : 49).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu. Ketentuan ini berarti, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana pelaksana semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jaralah dan sasaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah (Yani, 2002 : 232). Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 juga menetapkan bahwa anggaran pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Ini artinya tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaan dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya. (Yani, 2002 : 233).

2.2.4.3.Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut :

- Kelompok pendapatan, meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain dana pendapatan yang sah.
- Jenis pendapatan, misalnya pajak daerah, restribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Belanja Daerah dirinci menurut :

- Organisasi, yaitu suatu kesatuan pengguna anggaran seperti Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sekretariat daerah, serta Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya.
- Fungsi, misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya.
- Jenis belanja, yaitu seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal atau pembangunan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiyaan dirinci menurut sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan asset daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan. Sebagai satu kesatuan, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaannya.

Dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di atas akan ada kemungkinan surplus atau defisit. Surplus anggaran terjadi jika terdapat selisih lebih Pendapatan daerah terhadap Balanja Daerah. Sebaliknya defisit terjadi jika terdapat selisih kurang Pendapatan Derah terhadap Belanja Daerah, sedangkan jumlah pembiayaan sam dengan jumlah surplus atau defisit anggaran (Yani dan ahmad, 2002 : 240).

2.2.5. Inflasi

2.2.5.1. Pengertian Inflasi

Menurut Keynes inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut dengan *inflationary gap*). Dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari teori Keynes adalah adanya kenaikan harga-harga karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia dan pada akhirnya akan menimbulkan *inflationary gap.*

Inflasi menurut Boediono adalah kecenderungan harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Dalam prakteknya inflasi menurut Boediono ini bisa diamati melalui gerak dari indeks harga, tetapi disini juga harus diperhitungkan dengan ada tidaknya *surprised inflasi*, atau inflasi yang ditutupi karena adanya harga-harga bebas atau harga tidak resmi yang lebih tinggi dari pada harga-harga resmi dan harga-harga tersebut cenderung naik. Maka yang dimaksud dengan inflasi adalah terjadinya kenaikan harga-harga secara terus menerus dalam satu periode dimana ada pengaruh dari kenaikan harga barang-barang terhadap perhitungan inflasi. (Boediono, 1998:161).

Menurut Nopirin inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus dalam satu periode tertentu. (Nopirin, 2000:25).

Dari pendapat beberapa para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga dari barang-barang secara terus menerus sehingga mengakibatkan melemahnya nilai mata uang.

2.2.5.2.Jenis Inflasi

Ada beberapa macam cara untuk menggolongkan jenis inflasi :

1. Atas dasar parah atau tidaknya inflasi tersebut disini debedakan menurut 3 sifat yaitu : (Nopirin, 2000:27)
   a. *Creeping inflation* atau inflasi ringan (kurang dari 10 %/ tahun).
      Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan prosentase yang kecil dan dalam jangka waktu yang lama.
   b. *Galloping Inflation* atau inflasi sedang (antara 10%-30% / tahun).
      Kenaikan harga kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatife pendek serta mempunyai sifat akselerasi, artinya adalah harga-harga minggu atau bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat dari pada *creeping inflation.*
   c. *Hyper inflation* atau inflasi berat (antara 30%-100%).
      Akibatnya masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang, nilai uang merosot dengan tajam sehingga masyarakat ingin menukarkan uangnya dengan barang. Pertukaran uang makin cepat dan harga barang naik secara ekselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang ditutupi dengan pencetakan uang baru.
2. Atas dasar sebab-sebab awal dari inflasi.

   Sebelum kebijaksanaan untuk mengatasi inflasi diambil, perlu terlebih dahulu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan inflasi menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan oleh penambahan jumlah uang yang

beredar. Atas dasar ini dapat dibedakan menjadi dua inflasi yaitu : (Boediono, 1985:162).

a. *Demand pull inflation*

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan (*agregat demand*), sedangkan produksi berada pada keadaan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Kenaikkan permintaan total disamping menaikkan harga dapat juga menaikan hasil produksi (output), apabila kesempatan kerja penuh telah tercapai, maka penambahan permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga saja. Apabila kenaikkan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP berada diatas atau melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh maka akan terdapat " *inflationri gap*". *Inflationary gap* inilah yang dapat menimbulkan inflasi.

Gambar 1. Demand Pull Inflation

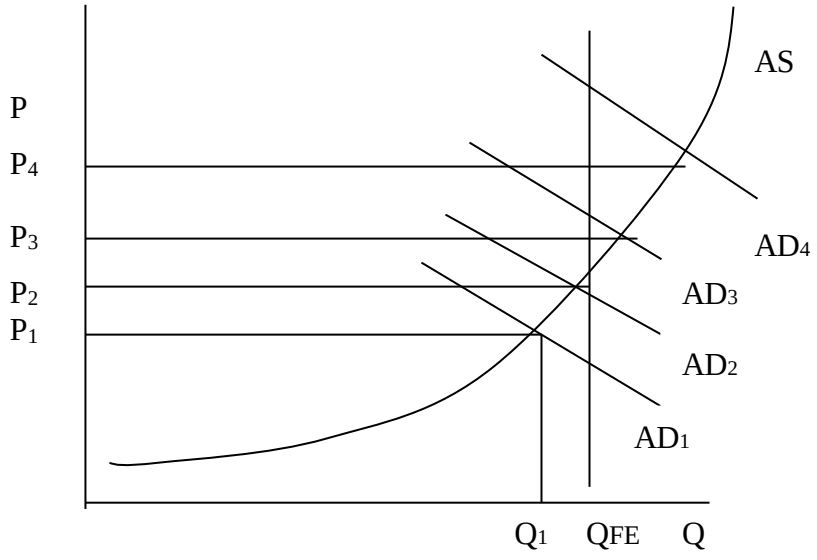

Sumber : Nopirin, 1987, Ekonomi Moneter. Edisi ke I, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta, hal 29.

Bermula dengan harga P_1 dan out put Q_1, kenaikan permintaan total dari AD_1 dan AD_2 menyebabkan ada sebagian permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh penawaran yang ada. Akibatnya, harga naik menjadi P_2 dan out put naik menjadi Q_{FE}.

b. *Cost push inflation.*

Berbeda dengan *demand pull inflation, cost pushl inflation* biasanya ditandai dengan kenaikan harga beserta dengan turunnya produksi, keadaan ini biasanya timbul dengan adanya penurunan dalam penawaran total sebagai akibat dari naiknya biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini dapat timbul karena beberapa faktor, diantaranya yaitu :

a) Perjuangan serikat buruh yang berhasil menuntut kenaikan upah.
b) Suatu industri yang sifatnya *monopolistis,* yaitu manager dapat menggunakan kekuasaannya dipasar untuk menentukan harga.
c) Kenaikan harga bahan baku industri.

Gambar 2. Cost Push Inflation

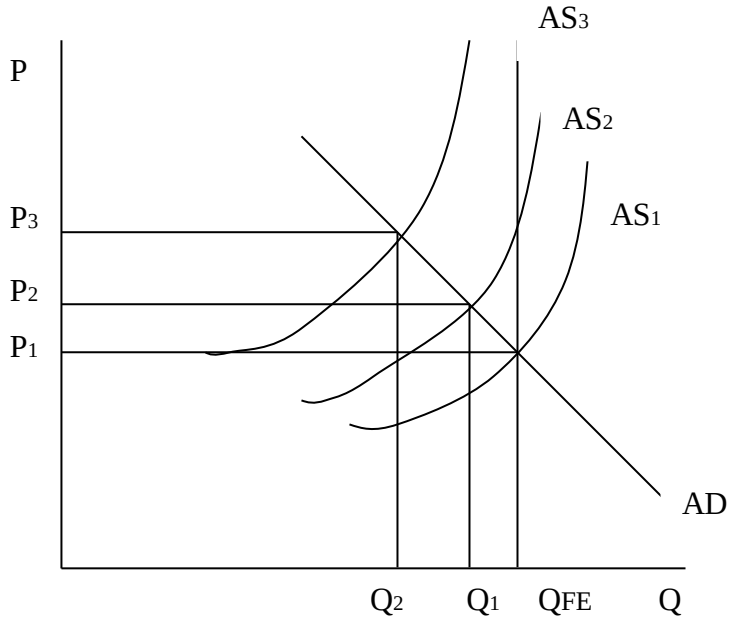

Sumber : Nopirin, 1987, Ekonomi Moneter. Edisi ke I. Penerbit BPFE UGM. Yogyakarta hal 31

Bermula pada harga P_1 dan Q_{FE}, kenaikkan biaya produksi (disebabkan baik karena berhasilnya tuntutan kenaikkan upah oleh serikat buruh ataupun kenaikkan harga bahan baku untuk industri) akan menggeser kurva penawaran total dari AS_1 menjadi S_2, konsekuensinya harga naik menjadi P_2 dan produksi turun menjadi Q_1. kenaikkan harga

selanjutnya akan menggeser kurva AS menjadi AS_3, harga naik dan produksi turun menjadi Q_2.

3. Berdasarkan asal dari inflasi, dibedakan menjadi dua yaitu :
    a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) misalnya, karena defisit anggaran belanja dan dibiayai dengan pencetakan uang baru, panenan yang gagal, dan sebagainya.
    b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation)*. Inflasi ini timbul kerena kenaikkan harga di luar negeri atau di negara-negara langganan berdagang dalam luar negeri. **(**Boediono, 1998**)**

Kenaikkan harga barang-barang yang kita impor mengakibatkan :

1. Secara langsung menaikkan indeks harga hidup kita karena sebagian dari yang mencakup didalamnya berasal dari import.
2. Secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikkan biaya produksi (dan kemudian harga jual, dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimport (*cosh inflation*).
3. Secara tidak langsung menimbulkan kenaikkan harga didalam negara. Karena ada kemungkinan kenaikkan harga barang-barang import yang akan mengakibatkan kenaikkan pada pengeluaran pemerintah atau swasta yang berusaha mengimbangi kenaikkan harga import tersebut (*demand inflation*).

Penularan inflasi dari luar negeri kedalam negeri bisa pula lewat kenaikkan harga barang-barang ekspor, dan saluran-salurannya hanya sedikit berbeda dengan penularan lewat kenaikkan harga barang-barang impor.

1. Bila harga barang-barang ekspor (seperti : kopi, teh) naik, maka indeks biaya hidup akan naik pula sebab barang-barang ini langsung masuk dalam daftar barang-barang yang tercakup dalam indeks harga.
2. Bila harga barang-barang ekspor (seperti : kayu, karet, timah, dan sebagainya) naik, maka ongkos produksi dari barang-barang yang menggunakan barang-barang tersebut dalam produksinya (perumahan,

sepatu, kaleng, dan sebagainya) akan naik, dan kemudian harga jualnya akan naik pula (*cost inflation)*.

3. Kenaikkan harga barang-barang ekspor berarti menaikkan penghasilan eksportir (dan juga karena produsen barang-barang ekspor tersebut). Kenaikkan penghasilan ini kemungkinan akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang (baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri). Bila jumlah barang yang tersedia dipasar tidak bertambah, maka harga barang-barang lain akan naik pula (*demand inflation*).

Penularan inflasi dari luar negeri kedalam negeri ini jelas mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka, yaitu yang sektor perdagangan luar negerinya sangat penting seperti, Indonesia, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Namun seberapa jauh penularan tersebut terjadi juga tergantung pada kebijakan pemerintah yang diamati. Dengan kebijakan moneter dan fiskal tertentu pemerintah bisa menetralisir kecenderungan inflasi yang berasal dari luar negeri **(** Boediono, 1998:158**).**

2.2.5.3.Dampak Inflasi

Akibat buruk dari inflasi dapat dibedakan menjadi dua aspek (**Sukirno, 1997:307**).

a. Akibat buruk pada perekonomian

Inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkendali dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penting yaitu :

1. Inflasi menggalakkan modal spekulatif.

Kepercayaan masyarakat pada nilai uang yang semakin turun menyebabkan masyarakat pemilik modal menanamkan uangnya pada investasi yang bersifat spekulatif. Misalnya : tanah, bangunan, dan benda-benda berharga.

2. Tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi investasi.

Untuk menghindari merosotnya nilai modal yang dipinjamkan perbankan kepada debitur, maka institusi perbankan

akan menaikkan tingkat bunga kreditnya, sehingga akan mempengaruhi tingkat investasi.

3. Inflasi menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi masa depan.

   Inflasi yang lepas dan tidak terkendali menyebabkan sulitnya meramalkan kondisi perekonomian dan arah perkembangan masa depan.

4. Menimbulkan masalah karena Neraca Pembayaran.

   Inflasi menyebabkan barang impor lebih murah dibandingkan barang produksi dalam negeri. Apabila impor semakin naik dan tidak diimbangi oleh kenaikkan ekspor maka akan menimbulkan defisit neraca perdagangan. Hal ini akan memperburuk nilai mata uang.

b. Akibat buruk pada individu atau masyarakat :

1. Dalam masa inflasi

   Harta-harta tetap seperti rumah, tanah, dan bangunan akan meningkat pesat, sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki harta, pendapatan riilnya akan semakin merosot.

2. Pendapatan riil merosot.

   Nilai riil tabungan merosot karena nilai uang semakin menurun. Inflasi juga memberikan dampak pada pendapatan, karena sifat inflasi ini tidak merata ada yang dirugikan tetapi ada juga yang diuntungkan. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh inflasi, demikian juga dengan orang yang menumpuk kekayaan dalam bentuk uang kas akan mengalami kerugian karena adanya inflasi, sebaliknya pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh pendapatan dengan prosentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana setiap nilainya naik dengan prosentase lebih besar dari pada laju inflasi.

2.3. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini beberapa faktor yang diteliti yang diduga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Surabaya adalah Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pengeluaran pembangunan dan Inflasi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu satu tahun. Apabila Poduk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan, maka akan berdampak pada peningkatan pandapatan asli daerah. Jika produk domestik regional bruto mengalami peningkatan maka mempengaruhi peningkatan Produksi, Pendapatan dan Pengeluaran sehingga pendapatan asli daerah mengalami peningkatan. (Anonim, 2002 : 3).

Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan asli daerah, baik melalui pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Misalnya, melalui pengeluaran rutin pemerintah menaikkan gaji dan tunjangan pegawai Negeri Sipil maupun TNI dan POLRI, melalui pengeluaran pembangunan, pemerintah merealisir pelaksana proyek-proyek pembangunan, sehingga kesempatan kerja dan pendapatan asli daerah bertambah. Dengan terjadinya pertambahan dalam pendapatan asli daerah tersebut maka dengan sendirinya pendapatan masyarakat akan bertambah pula dan pertambahan ini akan menimbulkan pertambahan baru dalam konsumsi yang selanjutnya akan menimbulkan lagi pertambahan dalam pendapatan asli daerah. Jika pengeluaran pembangunan mengalami peningkatan maka kesempatan kerja juga meningkat sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. (Sukirno dan Sardono, 1985 : 122)

Inflasi adalah terjadinya kenaikkan harga-harga secara terus menerus dalam satu periode dimana ada pengaruh dari kenaikkan harga barang-barang terhadap perhitungan inflasi. Tingkat inflasi akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian, yang dikarenakan terus naiknya

harga-harga barang. Sehingga apabila inflasi turun, hal itu secara otomatis akan dapat menaikkan pendapatan atau perekonomian masyarakat, karena harga-harga barang akan turun. Sehingga akan mempengaruhi tingkat kosumsi masyarakat, dan hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan pada sumber-sumber penghasilan Pendapatan Asli Daerah. Jika inflasi mengalami penurunan maka tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. (Boediono,1998 : 161).

Untuk memperjelas maksud dari uraian kerangka pemikiran di atas maka dapat digambarkan suatu paradigma sebagai berikut :

Gambar 3 : Kerangka Pikir

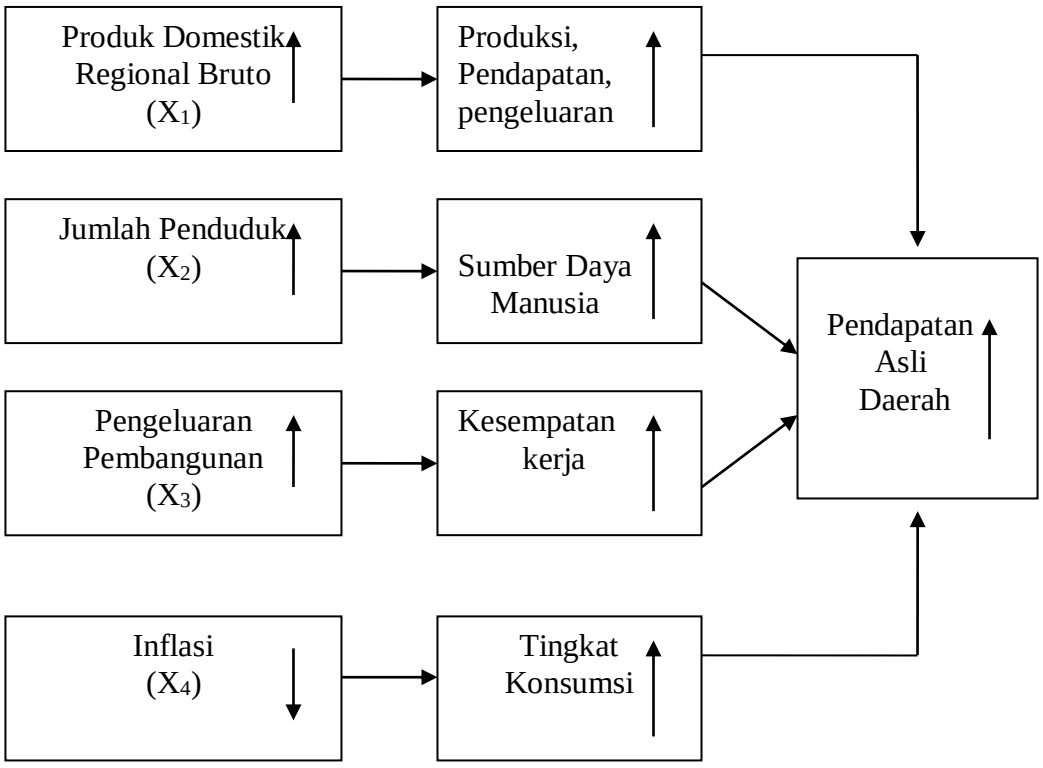

Sumber : Peneliti

2.3. Hipotesis

Setelah diadakan kajian teoritis yang mendasar terhadap permasalahan yang terjadi serta perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan latar belakang masalah yang

terjadi, maka berikut ini dibuat suatu pendugaan sementara atau suatu hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga bahwa faktor produksi domestik regional bruto, jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan dan inflasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya.
2. Diduga jumlah penduduk mempunyai pengaruh paling dominan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Dalam penelitian ini definisi operasionalnya terdiri dari :

a. Variabel tidak bebas (Y)

   Variabel tidak bebasnya adalah variabel yang tidak dapat berdiri sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) yaitu besarnya penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari : pajak daerah, restribusi daerah, laba usaha daerah dan penerimaan lain-lain pada daerah kota Surabaya dinyatakan dalam juta rupiah (Rp juta).

b. Variabel bebas (X)

   1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1).

      Adalah total nilai produksi barang dan jasa dari berbagai sektor di daerah kota Surabaya dalam satu tahun. Besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dinyatakan dalam juta rupiah (Rp juta).

   2. Jumlah Penduduk (X2) Adalah banyaknya penduduk yang tinggal di daerah kota Surabaya , jumlah penduduk ini dinyatakan dalam satuan jiwa.

   3. Pengeluaran Pembangunan (X3)

      Adalah pengeluaran pemerintah yang berbentuk proyek-proyek, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Pengeluaran Pembangunan dinyatakan dalam juta rupiah (Rp juta).

4. Inflasi (X4)

   Adalah suatu proses kenaikkan harga-harga dari barang-barang secara terus menerus sehingga mengakibatkan melemahnya nilai mata uang. Inflasi dinyatakan dalam persen (%).

3.2. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini data yang diambil secara *time series* yakni diambil tiap periode waktu, yang diambil dari kurun waktu antara tahun 2002 sampai dengan 2016, selama 15 tahun.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mangambil data-data laporan, catatan-catatan yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas, pada kantor dinas atau instansi terkait didalamnya. Dan untuk mendapatkan data yang cukup dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu :

1. Studi Kepustakaan

   Pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan studi kepustakaan misalnya, berasal dari berbagai literature yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

2. Studi Lapangan

   Studi lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan dalam perumusan penelitian.

   Data diperoleh dengan mengambil laporan, catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas pada Badan Pusat Statistik di Jawa Timur,dan Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur.

3.4. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

3.4.1. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan asumsi klasik *(best linear unbiased estimator)* yang bertujuan untuk menentukan arah dan kekuatan pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun bentuk persamaan untuk menentukan pada hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut :

Y = F (X1, X2, X3, X4)

Model fungsional tersebut diatas akan ditetapkan pada model regresi berganda baik linier maupun non linier seperti rumus dibawah ini :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + U$$

(**Sudrajat, 1988 : 127)**

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Surabaya

X1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

X2 = Jumlah Penduduk

X3 = Pengeluaran Pembangunan

X4 = Inflasi.

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \ldots \beta_4$. = Koefisien regresi X_1, X_2, X_3, dan X_4

U = Variabel pengganggu merupakan wakil dari semua faktor lain yang dapat mempengaruhi namun tidak dapat dimasukkan dalam model,

3.4.3. Uji Hipotesis

Selanjutnya untuk menguji hubungan simultan antara variabel bebas dan variabel terikat maka digunakan hipotesis sebagai berikut :

a. Uji F

Disebut juga uji beda varians yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan atau pangaruh dari variabel bebas secara simultan atau serempak terhadap variabel terikat, dengan kriteria sebagai berikut :

Ho = $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel independen {X1, X2, X3, X4 } terhadap variabel dependen {Y}).

Hi = $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ (terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen {X1, X2, X3, X4 } terhadap dependen {Y}).

Ho diterima jika F hitung $\leq$ F tabel

Ho ditolak jika F hitung > F table

$$F_{hitung} = \frac{KTRegresi}{KTGalat}$$ ..... (Gunawan, 2001 : 94)

Dimana :

KT = Kuadrat Tengah (Means of Square = MS)

Galat = Error = Residual.

Dengan derajat bebas = (k, n – k – 1).

Keterangan : n = Jumlah Sampel

k = Jumlah parameter regresi

Kaidah pengujiannya :

1. Bila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka Ho diterima dan H_1 ditolak, artinya varabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara simultan.
2. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara simultan.

b. Uji t

Yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh dari masing-masing variabel bebas dan secara parsial atau individu atau secara terpisah terhadap variabel terikat dan kriteria sebagai berikut :

Ho : $\beta i = 0$ (tidak ada pengaruh)

Hi : $\beta i \neq 0$ (ada pengaruh)

Ho diterima jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$

Ho ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$

$$t_{hitung} = \frac{\beta i}{Se(\beta i)} \quad \text{.....(Sudrajat, 1988 : 122)}$$

Dengan derajat kebebasan sebesar n – k – 1 dimana :

β = Koefisien Regresi.

Se = Standard Error.

n = Jumlah Sampel.

k = Jumlah Parameter Regresi

i = Variabel Bebas ke i (i = 1, 2, 3, 4)

Kaidah pengujian :

a. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ho ditolak dan Hi diterima, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

b. Apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka Ho diterima dan Hi ditolak, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

c. Uji Blue

Persamaan regresi tersebut diatas harus bersifat *(Best Linear Unbiased Estimator),* artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias. Untuk menguji model tersebut sudah termasuk *(Best Linear Unbiased Estimator)* atau tidak, maka tidak dapat dilakukan beberapa asumsi dasar yang harus

dipenuhi oleh regresi linear berganda, diantaranya adalah : **(Sudrajat, 1988 : 163)**

Persamaan regresi tersebut diatas harus bersifat BLUE *(Best Linear Unbiased Estimator)*, artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t ridak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE, maka harus dipenuhi oleh regresi linear berganda, yaitu :

1. Nilai tengah (mean Value) dari komponen pengganggu U , yang ditimbulkan dari variabel eksplantori harus sama dengan nol.
2. Varian dari komponen pengganggu U harus konstan harus memenuhi syarat homokedastisiti.
3. Tidak terjadi autokorelasi antar komponen pengganggu U.
4. Variabel eksplanatori harus non stokastik atau kalaupun stokastik, harus menyebar bebas dari komponen pengganggunya.
5. Tidak terjadi multikolineariti antar variabel eksplanatori.
6. Komponen pengganggu U harus tersebar mengikuti sebaran normal dengan nilai tengah = 0 dengan varian sebesar σ^2

Tetapi dari keenam asumsi tersebut yang biasa dipakai adalah autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolonieritas.

- *Autokorelasi*

Artinya adalah adanya korelasi antar anggota sample yang diurutkan berdasar waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data time series.

Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya. Lebih jauh lagi, model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir

nilai variabel dependen pada nilai variabel pada independen tertentu.

Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson (uji DW).

Uji DW dalam menentukan autokorelasi dalam regresi menggunakan pengujian terhadap residu | *e*| dari suatu regresi linier. Rumus yang digunakan disebut statistik *d* Durbin-Watson, yaitu sebagai berikut :

$$d = \frac{\sum e_n - e_{n-1})^2}{\sum e_n^2}$$

Hasil dari rumus tersebut (nilai *d*) kemudian dibandingkan dengan nilai *d* tabel DW. Di dalam tabel *d* itu dimuat dua nilai, yaitu nilai batas atas (d_u) dan nilai batas bawah (d_1) untuk berbagai nilai *n* dan *k*. jumlah sampel minimal 15 dan jumlah variabel bebas X_1, X_2, …, X_j, X_k).

Ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi dapat dilihat dengan membandingkan nilai *d* dengan nilai *d* yang terdapat dalam tabel berikut ini :

Klasifikasi nilai *d*

Nilai *d*	**Keterangan**
< 1,10	ada autokorelasi
1,10 – 1,54	tidak ada kesimpulan
1,55 -2,46	tidak ada autokorelasi
2,46 – 2,90	tidak ada kesimpulan
. 2,91	ada autokorelasi

Sumber : Iqbal Hasan, 2003, Statistik Inferensif, Penerbit Sinar Grafika Offset, hal. 290.

- *Heteroskedastisitas*

  Artinya varians variabel dalam model tidak sama. Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir (estimator) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar, walaupun penaksir yang diperoleh menggambarkan populasinya (tidak bias) dan bertambahnya sampel yang digunakan akan mendekati nilai sebenarnya (konsisten) ini disebabkan oleh variansnya yang tidak minimum (tidak efisien).

  Diagnosis adanya heterokesdatisitas secara kuantitatif dalam suatu regresi dapat dilakukan dengan melakukan pengujian korelasi rangking Spearman. Pengujian ini menggunakan distribusi t dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel}. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka pengujian menolak hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak terdapat heterokedastisitas pada model regresi. Artinya model tersebut mengandung heteroskedastisitas.

  Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan heteroskedastisitas dalam model regresi, yaitu dengan mentrasformasi variabel menjadi bentuk logaritma natural.

- *Multikolinearitas*

  Artinya, antara variabel independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna.

  Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel

independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
b. Menganalisa matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
c. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendahsama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/ Tolerance). Nilai eutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF >10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir. Sebagai missal nilai tolerance = 0.10 sama dengan tingkat kolinearitas 0.95. walaupun multikolinearitas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana saja yang saling berkorelasi.(Gozali,2005 : 91-92).

Menghilangkan adanya multikolinearitas pada suatu model regresi terdapat bermacam-macam cara. Cara yang paling mudah adalah menghilangkan salah satu atau beberapa variabel yang mempuyai korelasi tinggi dari model regresi. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan menambah data. Cara yang ketiga adalah menstransformasi variabel. Nilai variabel yang digunakan mundur satu tahun (**lag)**. (Algifari, 2000 : 84)

Apabila salah satu dari ketiga asumsi dasar dilanggar, maka persamaan regresi tidak bersifat BLUE, sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t menjadi bias. Untuk mengetahui model analisa tersebut cukup layak untuk digunakan untuk menentukan selanjutnya dan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat maka perlu diketahui nilai R^2 (koefisien nilai determinasi) dengan menggunakan :

$$R^2 = \frac{JumlahKuadratRe\ gresi}{TotalJumlahKuadrat}$$ ..... (Sudrajat, 1998 : 85)

Dimana :

R^2 = Koefisien Determinasi

Karakteristik dari R^2 adalah :

a. Tidak mempunyai nilai negative.
b. Nilai berkisar antara 0 dan 1 atau $0 \leq R^2 \leq 1$

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Depenelitian Obyek Penelitian

4.1.1. Letak Geografis dan Topografi Kota Surabaya

Nama Kota Surabaya sangat terkenal bagi masyarakat Indonesia sebagai kota pahlawan dan sekaligus kota metropolitan kedua terbesar di Indonesia setelah Ibu Kota Jakarta. Surabaya merupakan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur yang merupakan daerah yang cukup maju perekonomian dan dinyatakan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur, karena Surabaya memiliki titik pertumbuhan di hampir semua sektor lebih baik dari kota lainnya.

Menyadari kompleksnya masalah dan luasnya sasaran yang dihadapi, maka Pemerintah Kota Surabaya menetapkan suatu konsep untuk mewujudkan dan mengatasi permasalahan tersebut di atas dalam suatu semboyan “Suroboyoku Bersih dan Hijau”, sehingga tidaklah mengherankan jika Surabaya merupakan salah satu peraih Adipura Kencana. Potensi lain yang mendukung perkembangan Kota Surabaya adalah faktor lokasi geografi, curah hujan, angin dan topografi untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan Kota Surabaya.

Secara geografis Kota Surabaya terletak kurang lebih 160 mil sebelah Barat Pulau Bali atau kurang lebih 65000 mil sebelah Timur Jakarta yaitu antara 0712-0721 Lintang Selatan dan 11236-11254 Bujur Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah dari ketinggian 3-6 meter di atas permukaan air laut, sedangkan sebelah selatan ketinggiannya 25-50 meter di atas permukaan air laut.

Wilayah Kota Surabaya, seluruhnya kurang lebih 326,37 km yang terbagi dalam 31 kecamatan dan 163 kelurahan, yaitu terdiri dari:

1. Surabaya Pusat terdiri dari 5 kecamatan dengan 20 kelurahan.
2. Surabaya Utara terdiri dari 4 kecamatan dengan 24 kelurahan.
3. Surabaya Timur terdiri dari 7 kecamatan dengan 40 kelurahan.

4. Surabaya Selatan terdiri dari 8 kecamatan dengan 37 kelurahan.
5. Surabaya Barat terdiri dari 7 kecamatan dengan 42 kelurahan.

Sedangkan batas wilayah Kotamadya Surabaya secara administrasi adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dibatasi oleh Selat Madura.
2. Sebelah Timur dibatasi oleh Selat Madura.
3. Sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Sidoarjo.
4. Sebelah Barat dibatasi oleh Kabupaten Gresik.

4.1.2. Keadaan Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur yang merupakan kota transito atau "*Transito City*" dengan harapan dapat berperan lebih efektif dalam menunjang kelancaran perhubungan baik dalam skala pelayaran di dalam kota, nasional maupun internasional.

Karena letaknya yang strategis dan banyak tenaga kerja yang cukup terdidik, serta hubungan internasional yang telah terjalin sejak lama, telah menjadikan Surabaya memegang peranan penting di sektor industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata sejak jaman penjajahan Belanda. Fasilitas infrastruktur telah banyak dikembangkan dengan lebih mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 9% per tahun pada periode pembanguan jangka panjang 5 tahun tahap kedua.

Kawasan industri Surabaya yang terdiri 1094 perusahaan potensial *go public* merupakan salah satu infrastruktur yang berkembang cukup pesat. Peningkatan jalan tol secara terus menerus dilakukan dengan pembangunan jalur-jalur transportasi dari Surabaya menuju kota-kota lain di Jawa Timur. Pelabuhan Tanjung Perak yang sejak tahun 190 telah dilengkapi dengan terminal peti kemas, semakin semarak seiring dengan peningkatan pengiriman barang ekspor dan impor. Pintu gerbang lainnya untuk Surabaya adalah Pelabuhan Udara Internasional Juanda yang memiliki rute penerbangan ke luar kota atau luar negeri, serta kedatangan kunjungan dari luar negeri atau luar kota.

Dengan semakin banyaknya kegiatan atau kunjungan yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai tempat, membuat Kota Surabaya semakin ramai. Seiring dengan kondisi tersebut, pemanfaatan tempat atau jasa milik pemerintah semakin mengalami peningkatan seperti pemakaian sarana telekomunikasi, transportasi, tempat tinggal dan lain-lain. Keadaan yang demikian akan semakin baik guna menunjang dan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dari berbagai sektor, yang secara logis dengan meningkatnya mobilitas penduduk, akan semakin meningkat pula kesibukan kota itu sendiri dan sudah barang tentu hal ini akan menghasilkan penerimaan pendapatan daerah di Surabaya.

Sedangkan faktor-faktor pendukung lainnya adalah semakin berkembangnya pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan dan dearah-daerah wisata yang secara tidak langsung mempunyai dampak positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah yang salah satu unsurnya adalah pajak hiburan.

4.1.3. Keadaan Penduduk di Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi setelah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara Indonesia. Tingkat kepadatan penduduk yang terjadi di Kota Surabaya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Geografis dan Letak Strategis

   Surabaya merupakan gerbang utama bagi kawasan Indonesia Bagian Timur, memiliki posisi penting dan fasilitas yang menunjang bagi kegiatan perekonomian seperti perdagangan, industri, perhubungan dan pertanian.

2. Faktor Industri

   Pertumbuhan dan perkembangan, baik industri besar, sedang, kecil maupun industri kerajinan tangan merupakan daya tarik tersendiri bagi arus penyeberangan urbanisasi. Hal ini dapat diketahui bahwa wilayah kecamatan yang banyak memiliki industri, tingkat

kepadatannya penduduknya lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang jarang industrinya. Dengan besarnya jumlah penduduk akan berpengaruh terjadap jumlah tenaga kerja yang tersedia di masyarakat yang perlu ditampung pada berbagai sektor ekonomi.

4.2. Depenelitian Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan dan inflasi sebagai variabel bebas. Data dari masing-masing variabel diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Jawa Timur dari tahun 2002 sampai 2016. Berikut adalah gambaran statistik masing-masing variabel.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya Tahun 2002-2016

Tahun	PAD (Rp)	Perkembangan (%)
2002	53.304.870.000	–
2003	59.899.749.000	12,37
2004	82.824.464.000	38,27
2005	104.614.150.000	26,31
2006	118.972.597.000	13,73
2007	142.238.941.000	19,56
2008	122.055.376.000	– 14,19
2009	138.684.846.000	13,62
2010	131.115.000.000	– 5,46
2011	207.993.326.710	58,63
2012	277.863.171.000	33,59
2013	348.310.014.000	25,35
2014	417.361.035.009	19,82
2015	496.190.083.100	18,89
2016	595.619.466.259	20,04

Sumber : BPS Jawa Timur

Berdasarkan Tabel 1 di atas diketahui bahwa di Kota Surabaya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp. 53.304.870.000, sedangkan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 595.619.466.259 dengan tingkat perkembangan 20,04%. Tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai tahun 2002 hingga tahun 2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya cenderung meningkat. Peningkatan PAD terbesar terjadi pada tahun 2011 dari Rp. 131.115.000.000 (tahun 2010) menjadi Rp. 207.993.326.710 dengan tingkat perkembangan 58,63%. Peningkatan tersebut terjadi karena mulai tahun 2011 keadaan ekonomi dan politik di Indonesia semakin membaik dengan adanya reformasi di segala bidang. Oleh karena itu aktivitas ekonomi di Kota Surabaya semakin giat dan fasilitas-fasilitas pemerintah Kota Surabaya semakin banyak digunakan oleh masyarakat sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya semakin meningkat.

4.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto di Kota Surabaya mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Surabaya Tahun 2002-2016

Tahun	PDRB (Rp)	Perkembangan (%)
2002	12.485.100.000.000	–
2003	10.367.941.710.000	– 16,96
2004	11.974.999.760.000	15,50
2005	13.335.639.260.000	11,36
2006	14.855.897.480.000	11,40
2007	15.735.548.660.000	5,92
2008	12.897.079.610.000	– 18,04
2009	13.036.491.010.000	1,08
2010	13.455.465.850.000	3,21
2011	14.028.424.460.000	4,26
2012	14.562.067.600.000	3,80
2013	15.176.355.170.000	4,22
2014	16.650.850.000.000	9,72
2015	19.646.260.000.000	17,99
2016	20.454.301.931.900	4,11

Sumber : BPS Jawa Timur

Berdasarkan Tabel 2 di atas diketahui bahwa di Kota Surabaya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terendah terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp.10.367.941.710.000 dengan tingkat perkembangan –16,96%, sedangkan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.20.454.301.931.900 dengan tingkat perkembangan 4,11%.

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa mulai tahun 2002 hingga tahun 2016, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Surabaya cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 terjadi penurunan PDRB yang cukup besar dari Rp.15.735.548.660.000 (tahun 2007) menjadi Rp. 12.897.079.610.000 dengan tingkat perkembangan –18,04%. Penurunan tersebut terjadi karena pada tahun 2008 merupakan puncak dari reformasi yang mengakibatkan keadaan ekonomi semakin tidak stabil dan terjadi krisis moneter sehingga banyak sektor industri dan jasa di Kota Surabaya yang mengurangi produksi barang dan jasanya. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan PDRB yang cukup besar dari Rp.16.650.850.000.000 (tahun 2014) menjadi Rp. 19.646.260.000.000 dengan tingkat perkembangan 17,99%. Kenaikan tersebut disebabkan karena kedaan ekonomi di Indonesia semakin membaik dengan diadakannya pemilu presiden tahun 2014 dan nilai rupiah semakin menguat sehingga sektor industri dan jasa di Kota Surabaya mulai memproduk barang dan jasanya dalam jumlah besar.

4.2.3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Surabaya mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : Jumlah Penduduk di Kota Surabaya Tahun 2002-2016

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (%)
2002	2.259.955	–
2003	2.286.413	1,17
2004	2.306.474	0,88
2005	2.339.335	1,42
2006	2.344.520	0,22
2007	2.356.486	0,51
2008	2.373.282	0,71
2009	2.405.946	1,38
2010	2.444.976	1,62
2011	2.568.352	5,05
2012	2.529.468	– 1,51
2013	2.659.566	5,14
2014	2.691.666	1,21
2015	2.740.490	1,81
2016	2.784.196	1,59

Sumber : BPS Jawa Timur

Berdasarkan Tabel 3 di atas diketahui bahwa di Kota Surabaya, jumlah penduduk terkecil terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 2.259.955 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2.784.196 jiwa dengan tingkat perkembangan 1,59%.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai tahun 2002 hingga tahun 2016, jumlah penduduk di Kota Surabaya cenderung mengalami kenaikan. Peningkatan jumlah penduduk terbesar terjadi pada tahun 2013 dari 2,529,468 jiwa (tahun 2012) menjadi 2.659.566 jiwa dengan tingkat perkembangan 5,14%. Kenaikan tersebut disebabkan karena menurunnya angka kematian jiwa di Kota Surabaya, seiring dengan semakin diperhatikannya tingkat kesehatan bagi ibu, anak dan manula.

4.2.4. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan di Kota Surabaya mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : Pengeluaran Pembangunan di Kota Surabaya Tahun 2002-2016

Tahun	Pengeluaran Pembangunan (Rp)	Perkembangan (%)
2002	59.580.055.000	–
2003	60.276.862.000	1,17
2004	75.921.714.000	25,95
2005	93.195.051.000	22,75
2006	117.257.271.000	25,82
2007	128.438.753.000	9,54
2008	124.790.464.000	– 2,84
2009	102.926.334.000	– 17,52
2010	125.804.371.000	22,23
2011	85.603.704.320	– 31,95
2012	247.917.304.000	189,61
2013	376.081.925.000	51,70
2014	477.435.870.262	26,95
2015	606.104.667.786	26,95
2016	769.449.660.560	26,95

Sumber : BPS Jawa Timur

Berdasarkan Tabel 4 di atas diketahui bahwa di Kota Surabaya, pengeluaran pembangunan terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp. 59.580.055.000, sedangkan pengeluaran pembangunan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 769.449.660.560 dengan tingkat perkembangan 26,95%.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai tahun 2002 hingga tahun 2016, pengeluaran pembangunan di Kota Surabaya cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 terjadi penurunan pengeluaran pembangunan yang cukup besar dari Rp. 125.804.371.000 (tahun 2010) menjadi Rp. 85.603.704.320 dengan tingkat perkembangan –31,95%. Penurunan tersebut terjadi karena mulai tahun 2012 diadakan reformasi di segala bidang, termasuk adanya sosialisasi otonomi daerah. Oleh karena itu Kota Surabaya masih membenahi diri sehingga belum banyak dilakukan pembangunan di wilayah Surabaya. Mulai tahun 2012 hingga 2016 terjadi peningkatan pengeluaran pembangunan yang cukup

pesat, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2012 dari Rp. 85.603.704.320 (tahun 2011) menjadi Rp. 247.917.304.000. Peningkatan tersebut terjadi karena semakin membaiknya keadaan politik dan ekonomi di Indonesia dengan adanya reformasi di segala bidang, serta mulai dijalankannya otonomi daerah sehingga pemerintah Kota Surabaya semakin giat melakukan pembangunan di wilayahnya.

4.2.5. Inflasi

Inflasi di Kota Surabaya mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : Inflasi di Kota Surabaya Tahun 2002-2016

Tahun	Inflasi (%)	Perkembangan (%)
2002	5,28	–
2003	10,19	4,91
2004	8,25	– 1,94
2005	7,80	– 0,45
2006	6,68	– 1,12
2007	9,11	2,43
2008	95,21	86,10
2009	1,39	– 93,82
2010	10,46	9,07
2011	14,13	3,67
2012	9,15	– 4,98
2013	4,79	– 4,36
2014	5,92	1,13
2015	14,12	8,20
2016	6,71	– 7,41

Sumber : BPS Jawa Timur

Berdasarkan Tabel 5 di atas diketahui bahwa di Kota Surabaya, inflasi terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 1,39% dengan tingkat perkembangan –93,82%, sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 95,21% dengan tingkat perkembangan 86,10%.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai tahun 2002 hingga tahun 2016, inflasi di Kota Surabaya cenderung berfluktuasi (mengalami kenaikan dan penurunan). Pada tahun 2008 terjadi lonjakan inflasi yang cukup tinggi dari 9,11% (tahun 2007) menjadi 95,21%.

Lonjakan tersebut terjadi karena tahun 2008 merupakan puncak dari reformasi dengan dilengserkannya Presiden Soeharto sehingga terjadi lonjakan harga barang di Indonesia terutama harga kebutuhan pokok hal tersebut juga mempengaruhi lonjakan harga di Kota Surabaya. Pada tahun 2009 terjadi penurunan inflasi dari 95,21% (tahun 2008) menjadi 1,39% dengan tingkat perkembangan –93,82%. Penurunan inflasi tersebut terjadi karena harga barang di pasaran mulai menurun seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto, akan tetapi pada tahun 2010 terjadi peningkatan inflasi lagi menjadi 10,46% dengan tingkat perkembangan 9,07%. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2010 diadakan pemilu yang pertama sejak lengsernya Presiden Soeharto. Selanjutnya pada tahun 2015 kembali terjadi peningkatan inflasi dari 5,92% (tahun 2014) menjadi 14,12%, hal tersebut karena pada tahun 2014 diadakan pemilu yang kedua. Inflasi semakin menurun sejalan dengan membaiknya keadaan ekonomi di Indonesia dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

4.3. Hasil Pengolahan dan Analisa Data

4.3.1. Uji Asumsi Klasik Analisis Regresi

Tujuan dari pengujian asumsi klasik analisis regresi adalah untuk mengetahui secara pasti apakah model regresi linier berganda menghasilkan keputusan yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), dalam arti pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak bias, hal tersebut perlu diuji dengan menggunakan asumsi dasar berikut ini :

4.3.1.1. Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan dalam model regresi terdapat korelasi antar anggota sample yang diurutkan berdasar waktu. Model regresi yang baik bebas dari autokorelasi. Pendeteksian ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW-test). Suatu observasi dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai

Durbin Watson berada antara 1,55 hingga 2,46. Berikut adalah nilai Durbin Watson yang dihasilkan model regresi:

Tabel 6 : Hasil Uji Autokorelasi

Model	Nilai Durbin Watson
1	2,406

Sumber : Data diolah

Nilai Durbin Watson yang dihasilkan dari model regresi adalah 2,406 yang terletak di antara 1,55 hingga 2,46 atau terletak di daerah tidak ada autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak ada autokorelasi dipenuhi.

4.3.1.2. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik tidak mengandung heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Rank Spearman*, yaitu dengan cara menghitung korelasi *Rank Spearman* antara *unstandardized residual* dengan seluruh variabel bebas, apabila nilai signifikansi > α (α = 0,05) maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas untuk masing-masing variabel bebas.

Tabel 7 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Signifikansi Korelasi *Rank Spearman*
Produk Domestik Regional Bruto (X_1)	0,810
Jumlah penduduk (X_2)	0,980
Pengeluaran pembangunan (X_3)	0,685
Inflasi (X_4)	0,428

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi korelasi *Rank Spearman* untuk semua variabel bebas lebih besar dari 0,05 (alpha 5%), yang berarti tidak terdapat korelasi antara residual dengan variabel bebasnya. Dari hasil tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga asumsi terpenuhi.

4.3.1.3. Multikolinieritas

Multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independent (bebas) dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak mengandung multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas digunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila VIF di bawah 10, maka persamaan regresi linier berganda tersebut tidak terkena multikolinieritas. Pengujian hipotesis menghasilkan nilai VIF seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 8 : Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF
Produk Domestik Regional Bruto (X_1)	5,997
Jumlah penduduk (X_2)	5,519
Pengeluaran pembangunan (X_3)	9,323
Inflasi (X_4)	1,025

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai VIF dari variabel Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan dan inflasi, semuanya menunjukkan angka di bawah 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas sehingga asumsi terpenuhi.

4.3.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengujian asumsi di atas, terlihat bahwa asumsi-asumsi yang mendasari analisis regresi telah terpenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan hasil analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh faktor Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan, dan inflasi terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Surabaya, serta untuk mengetahui faktor mana yang berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.3.2.1. Persamaan Regresi

Berikut adalah nilai estimasi koefisien regresi:

Tabel 9 : Nilai Estimasi Koefisien Regresi

Model	Koefisien Regresi	
	β	Std. Error
Produk Domestik Regional Bruto (X1)	0,005	0,003
Jumlah penduduk (X2)	413.117,407	51.005,810
Pengeluaran pembangunan (X3)	0,398	0,052
Inflasi (X4)	– 88.319.759,296	170.320.923,675
Konstanta	– 957.791.461.865,430	
R	0,997	
R2	0,995	

Sumber : Data diolah

Berdasarkan nilai estimasi koefisien regresi di atas, dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$Y = – 957.791.461.865,430 + 0,005\ X_1 + 413.117,407\ X_2 + 0,398\ X_3 – 88.319.759,296\ X_4$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

β_0 = Konstanta = – 957.791.461.865,430

Artinya terjadinya penurunan terhadap variabel terikat Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya (Y) sebesar Rp. 957.791.461.865,430, dengan asumsi seluruh variabel bebas (Produk Domestik Regional Bruto (X_1), jumlah penduduk (X_2), pengeluaran pembangunan (X_3), inflasi (X_4)) konstan.

β_1 = Koefisien regresi Produk Domestik Regional Bruto (X_1) = 0,005

Artinya apabila Produk Domestik Regional Bruto di Kota Surabaya naik sebesar Rp.1, maka Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya juga akan mengalami peningkatan sebesar Rp.0,005, dengan asumsi variabel bebas yang lain (X_2), (X_3) dan (X_4) tetap/konstan.

β_2 = Koefisien regresi jumlah penduduk (X_2) = 413.117,407

Artinya apabila jumlah penduduk di Kota Surabaya naik sebesar 1 jiwa, maka Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya juga akan

mengalami peningkatan sebesar Rp. 413.117,407, dengan asumsi variabel bebas yang lain (X_1), (X_3) dan (X_4) tetap/konstan.

β_3 = Koefisien regresi pengeluaran pembangunan (X_3) = 0,398

Artinya apabila jumlah pengeluaran pembangunan di Kota Surabaya naik sebesar Rp.1, maka Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya juga akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 0,398, dengan asumsi variabel bebas yang lain (X_1), (X_2) dan (X_4) tetap/konstan.

β_4 = Koefisien regresi inflasi (X_4) = –88.319.759,296

Artinya apabila inflasi di Kota Surabaya naik sebesar 1%, maka Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya akan mengalami penurunan sebesar Rp.88.319.759,296, dengan asumsi variabel bebas yang lain (X_1), (X_2) dan (X_3) tetap/konstan.

4.3.2.2. Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi atau R Square menunjukkan prosentase seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. Berikut adalah nilai R Square yang dihasilkan oleh model regresi:

Tabel 10 : Koefisien Determinasi (R Square)

Model	R	R Square
1	0,997	0,995

Sumber : Data diolah

Nilai R Square yang dihasilkan oleh model regresi adalah sebesar 0,995, yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya yang disebabkan karena Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan dan inflasi adalah sebesar 99,5%, sedangkan 0,5% disebabkan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.3.2.3. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pangaruh secara simultan atau serempak dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara simultan ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya secara simultan tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis pengaruh secara simultan variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1), jumlah penduduk (X_2), pengeluaran pembangunan (X_3) dan inflasi (X_4) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y):

Tabel 11 : Hasil Pengujian Pengaruh Variabel Bebas Secara Simultan

Sumber Keragaman	Jumlah Kuadrat	db	Kuadrat Tengah	F_{hitung}
Regresi	$4{,}001 \times 10^{23}$	4	$1{,}000 \times 10^{23}$	488,489
Residual	$2{,}048 \times 10^{21}$	10	$2{,}048 \times 10^{20}$	
Total	$4{,}022 \times 10^{23}$	14		

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 488,489 yang nilainya lebih besar dari pada nilai F_{tabel} ($\alpha = 0{,}05$, db regresi = 4, db residual = 10) yaitu 3,478, hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.

4.3.2.4.Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pangaruh secara parsial atau individu dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis pengaruh secara parsial variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1), jumlah penduduk (X_2), pengeluaran pembangunan (X_3) dan inflasi (X_4) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y):

Tabel 12 : Hasil Pengujian Pengaruh Variabel Bebas Secara Parsial

Parameter	t_{hitung}	t_{tabel}	r	r^2
Produk Domestik Regional Bruto (X_1)	1,310	2,228	0,383	0,147
Jumlah penduduk (X_2)	8,099	2,228	0,932	0,869
Pengeluaran pembangunan (X_3)	7,601	2,228	0,923	0,852
Inflasi (X_4)	– 0,.519	2,228	-0,162	0,026

Sumber : Data diolah dan Data diolah

Hasil uji t antara Produk Domestik Regional Bruto dengan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan t_{hitung} sebesar 1.310, sedangkan t_{tabel} ($\alpha/2 = 0.025$; db residual = 10) adalah sebesar 2.228, karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu 1.310 < 2.228, maka disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.

Nilai koefisien determinasi parsial (r^2) variabel Produk Domestik Regional Bruto adalah sebesar 0,147 atau 14,7%. Hal ini menunjukkan variabel Produk Domestik Regional Bruto mampu menjelaskan Pendapatan Asli Daerah sebesar 14,7%, sedangkan sisanya 85,3% dijelaskan oleh variabel lain.

Hasil uji t antara jumlah penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan t_{hitung} sebesar 8,099, sedangkan t_{tabel} ($\alpha/2 = 0,025$; db residual = 10) adalah sebesar 2,228, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 8,099 > 2,228, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.

Nilai koefisien determinasi parsial (r^2) variabel jumlah penduduk adalah sebesar 0,869 atau 86,9%. Hal ini menunjukkan variabel jumlah penduduk mampu menjelaskan Pendapatan Asli Daerah sebesar 86,9%, sedangkan sisanya 13,1% dijelaskan oleh variabel lain.

Hasil uji t antara pengeluaran pembangunan dengan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan t_{hitung} sebesar 7,601, sedangkan t_{tabel} ($\alpha/2 = 0,025$; db residual = 10) adalah sebesar 2,228, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 7,601 > 2,228, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.

Nilai koefisien determinasi parsial (r^2) variabel pengeluaran pembangunan adalah sebesar 0,852 atau 85,2%. Hal ini menunjukkan variabel pengeluaran pembangunan mampu menjelaskan Pendapatan Asli Daerah sebesar 85,2%, sedangkan sisanya 14,8% dijelaskan oleh variabel lain.

Hasil uji t antara inflasi dengan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan t_{hitung} sebesar -0,519, sedangkan t_{tabel} ($\alpha/2 = 0,025$; db residual = 10) adalah sebesar -2,228, karena $|t_{hitung}| < t_{tabel}$ yaitu 0,519 < 2,228, maka disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.

Nilai koefisien determinasi parsial (r^2) variabel inflasi adalah sebesar 0,026 atau 2,6%. Hal ini menunjukkan variabel inflasi mampu menjelaskan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,6%, sedangkan sisanya 97,4% dijelaskan oleh variabel lain.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pembangunan dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa secara simultan Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan dan inflasi berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Artinya secara serempak keempat faktor tersebut mempengaruhi kenaikan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya dengan signifikan (nyata). Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pengujian secara simultan antara variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan uji F yang menghasilkan F_{hitung} lebih besar F_{tabel} yaitu 488,489 > 3,478.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya. Pendapatan Asli Daerah berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba usaha daerah dan penerimaan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah sangat diperlukan untuk lebih memperlancar dan meningkatkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis diketahui R Square = 0,995, artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya mampu dijelaskan oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan dan inflasi sebesar 99,5%, sedangkan sisanya sebesar 0,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Dilihat dari nilai korelasi parsial, variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya adalah jumlah penduduk, karena variabel tersebut mempunyai nilai kuadrat korelasi parsial terbesar yaitu 0,869 atau 86,9%, sedangkan nilai koefisien determinasi parsial pengeluaran pembangunan, Produksi Domestik Regional Bruto dan inflasi masing-masing sebesar 0,852 atau 85,2%, 0,147 atau 14,7% dan 0,026 atau 2,6%.

4.4.2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya

Hasil pengujian hipotesis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pengujian secara parsial pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan uji t yang menghasilkan t_{hitung} kurang dari t_{tabel} yaitu 1,310 < 2,228. Hal ini berarti apabila total nilai produksi barang dan jasa dari berbagai sektor di daerah Kota Surabaya mengalami peningkatan atau penurunan, maka besarnya penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah di kota Surabaya tidak akan mengalami perubahan secara signifikan (nyata).

Secara teori apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan, maka akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jika Produk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan maka mempengaruhi peningkatan produksi dan pendapatan, sehingga Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Akan tetapi dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Tidak signifikannya pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya dapat disebabkan karena pemerintah Kota Surabaya kurang memanfaatkan sektor-sektor perekonomian di Kota Surabaya, sehingga meskipun produktivitas dari sektor-sektor perekonomian di Kota Surabaya mengalami peningkatan, hal tersebut tidak memberikan efek terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Misalnya tanjung perak masih bisa dikembangkan menjadi wisata bahari, akan tetapi pada saat ini hanya digunakan sebagai pelabuhan. Taman Hiburan Rakyat (THR) yang dulu terkenal sebagai tempat belanja dan hiburan yang murah,

sekarang tidak terawat lagi dan kalah bersaing dengan mall-mall yang semakin banyak. Selain itu, Pasar Turi yang dulu terkenal dengan harga yang murah, sejak terbakar belum dilakukan pembenahan sampai saat ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Goryatim (2012) yang menyimpulkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh secara nyata terhadap PAD di Kabupaten Probolinggo.

4.4.3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya

Hasil pengujian hipotesis pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pengujian secara parsial pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan uji t yang menghasilkan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu 8,099 > 2,228. Dilihat dari koefisien regresinya yang bernilai positif yaitu 413.117,407, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti apabila banyaknya penduduk yang tinggal di kota Surabaya mengalami peningkatan, maka besarnya penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah di kota Surabaya juga akan mengalami peningkatan, dimana peningkatan tersebut signifikan (nyata).

Apabila jumlah penduduk Kota Surabaya meningkat, secara tidak langsung akan meningkatkan sumber daya manusia di Kota Surabaya. Hal ini dapat membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memanfaatkan sumber-sumber perekonomian di Kota Surabaya dengan seefisien mungkin, sehingga secara tidak langsung peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Jumlah penduduk merupakan faktor dominan yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai kuadrat korelasi sebesar 0,869 atau 86,9%. Menurut Rosydi

(2004:84) penduduk merupakan sumber tenaga kerja, di samping sumber faktor produksi skill. Dengan peranan penduduk sebagai sumber tenaga kerja dan faktor produksi skill, maka jumlah penduduk yang besar pada suatu daerah akan menunjang peningkatan pendapatan daerah yang bersangkutan. Hal ini disebabkan dengan jumlah penduduk yang besar, produksi suatu daerah juga besar. .

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Rosalina (2009) yang menyimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

4.4.4. Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya

Hasil pengujian hipotesis pengaruh pengeluaran pembangunan dengan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan pengeluaran pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pengujian secara parsial pengaruh variabel pengeluaran pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan uji t yang menghasilkan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu 7,601 > 2,228. Dilihat dari koefisien regresinya yang bernilai positif yaitu 0,398, variabel pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti apabila pengeluaran pemerintah Kota Surabaya yang berbentuk proyek-proyek, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik mengalami peningkatan, maka besarnya penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah di kota Surabaya juga akan mengalami peningkatan, dimana peningkatan tersebut signifikan (nyata).

Pengeluaran pembangunan dapat mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah karena dengan pengeluaran pembangunan, pemerintah merealisasikan proyek-proyek pembangunan, hal ini akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat yang tinggal di Kota

Surabaya. Dengan meningkatnya kesempatan kerja, maka pendapatan masyarakat di Kota Surabaya akan meningkat, pendapatan tersebut akan digunakan oleh masyarakat untuk membayar pajak daerah dan restribusi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah bisa meningkat (Sukirno, 2008:122).

4.4.5. Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya

Hasil pengujian hipotesis pengaruh inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pengujian secara parsial pengaruh variabel inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan uji t yang menghasilkan $|t_{hitung}|$ kurang dari t_{tabel} yaitu 0,519 < 2,228. Hal ini berarti apabila inflasi yang terjadi di Kota Surabaya mengalami peningkatan atau penurunan, maka besarnya penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah di kota Surabaya tidak akan mengalami perubahan secara signifikan (nyata).

Secara teori tingkat inflasi yang tinggi akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian karena harga barang terus mengalami kenaikan. Apabila inflasi turun, secara otomatis akan menaikkan pendapatan atau perekonomian masyarakat karena harga barang turun. Tingkat inflasi yang menurun tersebut akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat sehingga terjadi peningkatan penghasilan pada sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, seperti meningkatnya laba usaha daerah. Akan tetapi dari hasil penelitian disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Tidak signifikannya pengaruh inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya dapat disebabkan karena sifat dasar masyarakat Surabaya yang konsumtif, jadi meskipun tingkat inflasi naik atau turun, masyarakat di Surabaya cenderung tetap suka mengkonsumsi barang atau jasa, tidak peduli harga

sedang naik atau turun, sehingga adanya penurunan tingkat inflasi tidak memberikan efek yang terlalu besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Goryatim 2012) yang menyimpulkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh secara nyata terhadap PAD di Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa diduga bahwa faktor Produksi Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan dan inflasi, berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya, secara parsial hanya terbukti pada jumlah penduduk dan pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan nilai koefisien determinasi parsial (r^2) dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena mempunyai nilai r^2 terbesar, dengan demikian hipotesis penelitian yang menduga bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya, terbukti kebenarannya.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji F disimpulkan bahwa secara simultan Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan dan inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Alasanya karena secara serempakkeempat faktor tersebutmempengaruhi kanaikan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya dengan signifikan (nyata)
2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji t disimpulkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Alasanya kesimpulan ini didasarkan pada hasil pengujian secara parsial pengaruh Variabel Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah uji t yang menghasilkan t_{hitung} kurang dari t_{tabel} yaitu 1,310 < 2,228. hal ini berarti apabila total nilai produksi barang dan jasa dari berbagai sektor di daerah Kota Surabaya mengalami peningkatan atau penurunan,maka besarnya penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah di Kota Surabaya tidak akan mengalami perubahan secara signifikan (nyata).
3. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji t disimpulkan bahwa secara parsial ada pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.alasannya Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pengujian secara parsial pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan uji t yang menghasilkan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu 8,099 > 2,228.

Dilihat dari koefisien regresinya yang bernilai positif yaitu 413.117,407, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti apabila banyaknya penduduk yang tinggal di Kota Surabaya juga akan mengalami peningkatan, dimana peningkatan tersebut signifikan (nyata).

4. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji t disimpulkan bahwa secara parsial ada pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. alasannya Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pengujian secara parsial pengaruh variabel pengeluaran pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan uji t yang menghasilkan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu 7,601 > 2,228. Dilihat dari koefisien regresinya yang bernilai positif yaitu 0,398, variabel pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti apabila pengeluaran pemerintah Kota Surabaya yang berbentuk proyek-proyek, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik mengalami peningkatan, maka besarnya penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah di Kota Surabaya juga akan mengalami peningkatan, dimana peningkatan tersebut signifikan (nyata).
5. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji t disimpulkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Alasannya kesimpulannya ini didasarkan pada hasil pengujian secara parsial pengaruh variabel inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan uji t yang menghasilkan $|t_{hitung}|$ kurang dari t_{tabel} yaitu 0,519 < 2,228. Hal ini berarti apabila inflasi yang terjadi di Kota Surabaya mengalami peningkatan atau penurunan, maka besarnya penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah di Kota Surabaya tidak akan mengalami perubahan secara signifikan (nyata).

6. Berdarkan koefisien determinasi parsial disimpulkan bahwa jumlah penduduk merupakan faktor yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Alasanya

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang telah diperoleh di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah Kota Surabaya memperhatikan jumlah penduduk dan pengeluaran pembangunan sebagai faktor-faktor yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya dengan signifikan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan jumlah penduduk dan pengeluaran pembagunan sebaik mungkin. Adanya jumlah penduduk yang besar di Kota Surabaya harus disertai skill dan ketrampilan yang baik sehingga penduduk bisa memafaatkan skill dan ketrampilannya untuk bekerja. Sedangkan dalam hal pengeluaran pembagunan, pemerintah Kota Surabaya harus memanfaatkan pengeluaran pembangunan seoptimal mungkin, sehingga proyek-proyek yang dibangun bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Surabaya yaitu terbukanya kesempatan kerja. Dengan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat Surabaya, maka pendapatan masyarakat Surabaya akan meningkat sehingga mereka bisa membayar pajak dan restribusi daerah yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Hendaknya faktor jumlah penduduk lebih diperhatikan karena faktor tersebut berpengaruh dominan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara membekali penduduk Kota Surabaya dengan keterampilan dan skill, sehingga mereka bisa memanfaatkan keterampilan dan keahliaannya untuk memanfaatkan sumber-sumber perekonomian di Kota Surabaya dengan seefisien mungkin, selain itu pemerintah Kota Surabaya hendaknya mendukung industri-industri kecil yang ada di Surabaya sehingga kesempatan kerja bagi penduduk Surabaya semakin besar.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya juga meneliti tentang Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya dengan periode pengamatan yang lebih panjang, serta memasukkan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah misalnya jumlah tenaga pemungut pajak, penerimaan dari pajak serta jumlah industri, sehingga diperoleh informasi yang lebih banyak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1999, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Peraturan Daerah.*

_____, 2000, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Arkala, Surabaya.

_____, 2012, *Produk Domestik Regional Bruto,* Badan Pusat Statistik.

_____, 2014, *Surabaya Dalam Angka,* Badan Pusat Statistik.

_____, 2016, *Surabaya Dalam Angka,* Badan Pusat Statistik.

Anwar, Arsyad, M dkk, 2-12, *Ekonomi Indonesia Prospek Jangka Panjang dan Sumber Pembiayaan Pembangunan,* Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Astuti, 2011, *Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Tingkat I Jawa Timur,* Penelitian Fakultas Ekonomi Jurusan IESP UPN "Veteran" Jawa Timur

Boediono, 2008, *Ekonomi Moneter*, Edisi Ketiga, BPFE, UGM, Yogyakarta.

Due, John, 2003, *Keuangan Negara*, Penerbit Airlangga, Jakarta.

Dumairi, 2007, *Perekonomian Indonesia,* Edisi keempat, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.

Fariqun, Latief, 1999, *Potensi Dan Kendala Peningkatan Peningkatan* Pendapatan *Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus di Kabupaten / Daerah Tingkat II Blitar,* Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Gede Riza, Wahendra, 1998, *Peranan Pandapatan Asli Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Tingkat I Bali 1989, 1990, 1996, 1997,UNAIR.*

Goryatim, 2002, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Probolinggo,* Penelitian Fakultas Ekonomi Jurusan IESP *UPN* "Veteran" jawa Timur.

Iqbal Hasan, 2003, *Statistik Inferensif*, Sinar Grafika Offset.

Istiono, 1999, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Mojokerto,* Penelitian Fakultas Ekonomi Jurusan IESP UPN "Veteran" Jawa timur

Kartasapoetra, G.E, Kamaluddin dan Rience, 1998, *Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan Pelaksanaannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Kristiadi, J.B, 1998, *Aspek Pembiayaan Dalam Pembangunan Kota*, Penerbit *Erlangga*.

Nopirin, 2000, *Ekonomi Moneter*, Buku II, Edisi Kesatu, BPFE, UGM, *Yogyakarta*.

Nopirin, 1987, *Ekonomi Moneter,* Edisi Kesatu, BPFE UGM, Yogyakarta.

Rachmat, Soemitro, 1998, *Asas-Asas Dasar Perpajakan I,* Edisi rrevisi, Cetakan *Kelima*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.

_____ 2000, *Dasar Hukum dan Pajak Pendapatan,* Penerbit Etisco, Jakarta

Rosalina, 1999, *Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di* Kabupaten *Daerah Tingkat II Banyuwangi,* Penelitian Fakultas Ekonomi Jurusan IESP UPN "Veteran" Jawa Timur.

Rosydi, Suherman, 1994, *Pengantar Teori Ekonomi, Edisi Keenam,Duta jasa.*

Samuelson paul,A dan Nordhaus, 1993, *Mikro Ekonomi,* Edisi Keempat Belas, Penerbit Erlangga.

Solichin, 2002, *Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di* Kotamadya *Kediri,* Penelitian Fakultas Ekonomi Jurusan IESP UPN "Veteran" Jawa Timur.

Sudrajat, 1988, *Mengenal Ekonometrika Pemula,* Cetakan Kedua, Penerbit CV. Armico, Bandung.

Sukirno, 1997, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Edisi Kedua, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta.

Sukirno, Sardono, 1985, *Ekonomi Pembangunan,* Cetakan Keempat, Penerbit *LPFEUI*, Fakultas Ekonomi , Universitas Indonesia, Jakarta.

Suparmoko, M, 2002, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah,* Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta.

Supranto, 1994, *Statistik – Teori dan Aplikasi,* Penerbit Erlangga, Jakarta.

Syamsi, Ibnu, 1998, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara,* Penerbit *Bina* Aksara , Jakarta.

Widiastuti, Nawang dan Astaning, 2001, *Identifikasi Sumber Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur,* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume Empat No 1 Desember.

Yani, Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Penerbit PT. Raja Rafindo Persada, Jakarta.